

# AKSES TERHADAP SUMBER DAYA DAN KEMISKINAN DI PEDESAAN JAWA: KASUS DESA SRIHARJO, YOGYAKARTA

*Pande Made Kutanegara\**

## 1. Pengantar

**S**ejak zaman dahulu, kemiskinan merupakan salah satu masalah pelik dan sulit dipecahkan di Indonesia. Belakangan ini, seiring dengan krisis yang melanda Indonesia, kemiskinan kembali menjadi fenomena menarik yang mendapat perhatian besar, baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat internasional. Hilangnya berbagai peluang kerja akibat krisis ekonomi dan naiknya harga berbagai kebutuhan penduduk telah meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Pada awal Repelita I, diperkirakan 70 juta penduduk atau 60 persen dari total penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin (World Bank, 1990). Angka tersebut menurun menjadi 40 persen atau 54,2 juta pada tahun 1976 dan menurun lagi secara drastis menjadi 14 persen atau 25,9 juta pada tahun 1993 (BPS, 1994). Pada tahun 1996, angka kemiskinan diperkirakan telah turun menjadi 22,6 juta atau 12 persen (Tjiptoherjanto, 1997). Angka kemiskinan yang turun sedemikian cepat dan cukup tajam, tiba-tiba mengalami peningkatan pada saat krisis. Banyak perdebatan muncul berkaitan dengan jumlah penduduk miskin pada saat krisis. Proyeksi yang dibuat oleh ILO-UNDP pada akhir tahun 1998 menunjukkan bahwa pada tahun 1998, sebanyak 48 persen (sekitar 90 juta orang) penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dalam laporan

yang sama juga ditunjukkan hasil analisis Popelle dan Pritchard yang menemukan hanya sekitar 14 persen penduduk yang jatuh miskin. Sementara Bank Dunia memperkirakan sekitar 20 persen penduduk jatuh ke jurang kemiskinan pada saat krisis. Proyeksi yang dibuat oleh Biro Pusat Statistik justru menghasilkan angka lebih tinggi, yakni sekitar 39 persen penduduk berada di bawah garis kemiskinan (ILO, 1999). Perbedaan angka kemiskinan yang cukup tajam tersebut berkaitan dengan sumber data dan metode yang digunakan tiap-tiap pihak. Selain itu, kegoncangan akibat krisis dan ketakutan akan berbagai dampak yang muncul pada lapisan masyarakat bawah (*grass root*) memaksa pemerintah untuk segera melakukan berbagai program penanggulangan dampak krisis. Untuk itu, pemerintah memerlukan data yang dapat dipakai sebagai patokan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan krisis. Sayangnya, pemerintah Orde Baru tidak memiliki data kemiskinan yang benar-benar valid. Berbagai proyeksi dengan metode penghitungan yang berbeda dikembangkan pada saat krisis. Oleh karena itu, bermunculan berbagai versi tentang karakteristik dan penyebaran penduduk miskin pada masa krisis.

Dalam perdebatan tentang kemiskinan, dua tingkat pembicaraan harus dicermati yakni pada tataran praktis dan tataran teoretis. Tataran praktis berkaitan dengan kondisi nyata penduduk miskin yang selalu mengalami kesulitan dalam memenuhi ke-

\* Doktorandus, Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada dan Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

butuhan hariannya. Selain itu, pada tingkat program juga dapat dilihat berbagai program pemerintah dan organisasi nonpemerintah yang bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi jumlah penduduk miskin. Tataran teoretis berkaitan dengan perdebatan yang cukup tajam mengenai berbagai konsep dan metodologi serta ukuran dan indikator yang digunakan dalam melihat fenomena kemiskinan. Kedua hal inilah yang kadangkala tidak bisa dipertemukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam berbagai program pengentasan kemiskinan, banyak masalah muncul ketika program yang direncanakan mulai diimplementasikan pada tingkat lebih rendah seperti kecamatan dan desa. Kesalahan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan merupakan satu hal yang umum di Indonesia. Kesalahan petugas lapangan dalam menggunakan ukuran kemiskinan telah mengakibatkan kesalahan pendataan sehingga sangat mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Hal ini mengakibatkan munculnya banyak kesalahan sasaran program bantuan pangan (beras murah, sembako) dan obat-obatan pada masa krisis yang lalu.

Masalah lain yang juga menjadi perdebatan adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. Menurut Loekman Soetrisno (1995), ada dua kelompok yang mempunyai pandangan berbeda dalam melihat kemiskinan. Kelompok pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengikuti pikiran dari kelompok *agrarian populism*, yang menyatakan bahwa masyarakat miskin muncul karena masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara terhadap kehidupan masyarakat. Campur tangan yang sedemikian kuat telah menciptakan berbagai hambatan dan rintangan bagi masyarakat untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, perlu dilaksanakan gerakan *empowerment* (pemberdayaan terhadap kelompok miskin. Kelompok kedua yang umumnya adalah para pejabat, berpandangan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah masalah budaya; orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Dengan kata lain, kelompok ini

melihat bahwa orang menjadi miskin karena kualitas sumber daya manusianya rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasinya pemerintah mengembangkan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pandangan lain menyatakan penyebab munculnya kemiskinan adalah keterbatasan akses penduduk terhadap sumber daya. Keterbatasan akses terhadap sumber daya menyebabkan munculnya isolasi terhadap penduduk miskin. Isolasi dapat dilihat dalam hal informasi, kekuasaan (*power*), kesempatan kerja, *networking*, dan bahkan kadangkala juga sistem bantuan yang menjadi sumber jaminan sosial mereka. *Being poor (having no possessions), lacking access to resources and being excluded from redistribution mechanisms as social security arrangements makes people much more vulnerable* (Kutanegara & G. Nooteboom, 2000). Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann (1994) menyatakan bahwa "*poverty or wealth refers to the economic condition measured by lack of ownership or command over resources and monetary incomes.*" Untuk memperoleh akses ke sumber daya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh relasi sosial dan *networking*. Mereka yang memiliki relasi sosial terbatas akan mengalami hambatan untuk memperoleh akses ke sumber daya, sebaliknya mereka yang memiliki keterbatasan fisik juga akan mengalami hambatan untuk mendapatkan akses ke sumber daya. Keterbatasan akses ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar (*external factor*), tetapi bisa juga bersumber dari lingkungan sendiri (*internal factor*), baik individual, rumah tangga, maupun lingkungan fisik dan sosial mereka. Sumber daya bisa didefinisikan sebagai berbagai peluang dan pemilikan barang dan benda yang berupa aset, hak milik, produk, sarana, kekayaan, kemakmuran, dan modal.

## 2. Berbagai Kajian dan Dimensi Kemiskinan di Indonesia

Pada zaman Orde Baru, tema kemiskinan mulai banyak dikaji sejak terbitnya buku David Penny dan Masri Singarimbun (1973) yang berjudul *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic*

from Sriharjo yang diterbitkan oleh Cornell University. Diterbitkannya buku ini di luar negeri sebenarnya juga mengandung dimensi politis. Pada saat itu (awal Orde Baru) pembicaraan tentang kemiskinan di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan dilarang keras karena dianggap sebagai hal yang kontraproduktif, melawan kebijakan, dan merongrong wibawa pemerintah. Oleh karena itu, publikasi tentang kemiskinan dalam dekade 1960—1970-an relatif terbatas. Hal ini sebenarnya cukup aneh karena tema kemiskinan di Indonesia telah menjadi wacana sejak zaman kolonial Belanda, terutama pada akhir abad kesembilan belas. Meningkatnya perdebatan di negeri Belanda tentang kemiskinan di Indonesia pada akhir abad kesembilan belas telah mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk membentuk suatu komisi penyelidikan yang bertugas untuk mencari kebenaran isu tentang kemerosotan kesejahteraan penduduk Jawa akibat program tanam paksa. Penyelidikan mulai dilakukan pada tahun 1904 melalui sebuah komisi yang disebut *Mindere Welvaarts Commissie*. Survei dilakukan di seluruh wilayah Pulau Jawa, kecuali wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Surakarta. Hasil survei menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan derajat kesejahteraan penduduk Jawa secara drastis. Masuknya perusahaan perkebunan besar di Jawa ternyata hanya menguntungkan kelompok pemilik modal (pemilik perusahaan perkebunan dan pemerintah kolonial Belanda), sementara penduduk Jawa menjadi semakin miskin (Surjo, 1985). Hasil penyelidikan yang telah mengeluarkan tenaga dan uang cukup besar, ternyata tidak banyak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan komisi penyelidikan kesejahteraan tersebut lebih banyak bertujuan politis daripada praktis. Setelah penyelidikan tersebut, penelitian tentang kemiskinan dan kelaparan di Jawa dilaporkan oleh C.L.M. Penders dalam bukunya yang berjudul *Bojonegoro 1900-1942: A Story of Endemic Poverty in North East Java- Indonesia*. Dalam buku tersebut dipaparkan penderitaan dan bencana kelaparan hebat yang pernah melanda wilayah Bojonegoro (Jawa Timur) pada masa pe-

merintahan kolonial Belanda (Singarimbun, 1996). Walaupun penelitian dan informasi tentang kemiskinan pada zaman kolonial sangat terbatas, penderitaan rakyat akibat tekanan pemerintah kolonial Belanda dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia. Bencana kelaparan dan tingkat konsumsi masyarakat yang sangat buruk ditemukan di hampir semua wilayah Indonesia.

Pada awal tahun 1980-an, mulai bermunculan penelitian kemiskinan yang terutama dikaitkan dengan program revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau yang dikembangkan sejak awal Orde Baru dianggap telah menciptakan kelompok miskin baru di pedesaan Jawa. Program revolusi hijau yang dilaksanakan melalui intensifikasi dan mekanisasi pertanian telah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok miskin akibat kehilangan peluang kerja di pedesaan Jawa (lihat White, 1976; White dan Wiradi, 1989; Husken, 1988; Husken, 1998).

Sebagian besar studi pada awal Orde Baru melihat bahwa akar kemiskinan di Jawa adalah terbatasnya lahan pertanian yang mereka miliki. Hasil penelitian Penny dan Singarimbun (1976) menyatakan bahwa penyebab utama dari kemiskinan adalah pemilikan lahan pertanian yang sempit yakni rata-rata 0,22 ha per rumah tangga. Tjondronegoro (1994) berpendapat bahwa kemiskinan di pedesaan Jawa, selain karena penduduk tidak memiliki lahan, juga karena tekanan penduduk yang sedemikian tinggi. Pada awal Orde Baru, tingkat kelahiran yang tinggi telah meningkatkan jumlah penduduk pedesaan sedemikian cepat, sementara peluang kerja di pedesaan sangat terbatas. Keadaan ini menyebabkan munculnya ketidakseimbangan daya dukung antara lingkungan dengan penduduk. Tekanan penduduk yang sedemikian hebat telah mengakibatkan munculnya eksploitasi yang berlebihan terhadap lahan di sekitarnya. Penggundulan hutan melalui penebangan kayu dan penanaman tanaman yang sangat boros terhadap unsur hara tanah, seperti ketela pohon, telah mengurangi kesuburan lahan yang ada (Palte, 1984). Dalam kondisi itu, mekanisme tradisional yang telah lama diterapkan yakni sistem bera (sistem penghentian dan pengistirahatan penggarapan lahan untuk bebe-

rapa waktu) tidak pernah dilakukan lagi. Kebutuhan bahan makanan yang meningkat terus telah memaksa mereka untuk melakukan eksploitasi lahan melalui penggunaan pupuk organik. Lahan pertanian di Jawa yang terbatas jelas tidak mampu mendukung jumlah penduduk yang meningkat terus. Penyempitan luas areal yang dikuasai maupun dimiliki semakin meningkat sehingga akses penduduk terhadap lahan pertanian juga semakin turun. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kemiskinan di pedesaan Jawa.

Untuk menganalisis kemiskinan, ada dua kategori ukuran tingkat kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi yang tingkat pendapatan seseorang itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan absolut ini merupakan kondisi penduduk yang benar-benar miskin dan dapat dilihat secara nyata di lapangan. Kemiskinan relatif adalah kondisi kemiskinan karena diperbandingkan dengan kelompok lain. Perhitungannya berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah, baik antara golongan lapisan sosial, antar-daerah, dan sebagainya. Dalam perhitungan kemiskinan relatif, posisi kemiskinan bisa selalu berubah-ubah. Walaupun demikian, kedua ukuran ini dalam kenyataannya sangat sulit diterapkan di lapangan. Apalagi dalam masyarakat Jawa yang memiliki nilai-nilai kultural yang khas dalam melihat persoalan hidup dan hakikat hidup, maka definisi ini pun masih banyak mendapatkan kendala. Dalam masyarakat Jawa misalnya, dikenal konsep "*urip sak anane*"/hidup sedaranya/hidup sederhana. Konsep ini memiliki makna yang sangat luas dan dalam sehingga sulit dikonversi dalam ukuran-ukuran kemiskinan yang dikenal dalam tataran teoretis. Konsep ini sangat lentur karena konsep sederhana sangat relatif, sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap-tiap rumah tangga.

Perdebatan tentang ukuran garis kemiskinan tidak pernah berhenti. Setiap ukuran yang digunakan memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan apalagi kalau digunakan pada tingkat mikro. Bank Dunia mendefinisikan ukuran angka kemiskinan adalah

pendapatan per kapita per satu hari sebesar 1 dolar. Ukuran semacam ini tentu sangat sulit diterapkan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena patokan yang digunakan sangat tinggi, apalagi dalam situasi devaluasi dan inflasi yang bergerak sangat cepat di Indonesia. Kalau ukuran ini digunakan, diduga lebih dari 50 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin.

Sajogyo (1974) sebenarnya telah mengusulkan ukuran kemiskinan melalui perhitungan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Menurutnya ada tiga golongan penduduk miskin, yaitu penduduk sangat miskin yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah 20 kg beras; penduduk miskin adalah mereka yang mengeluarkan per kapita per bulan sebanyak 20 hingga 26 kg beras; dan lapisan yang sedikit miskin adalah mereka yang mengeluarkan antara 26 sampai 30 kg beras per kapita per bulan. Mereka yang mengeluarkan lebih dari 30 kg beras per kapita per bulan dikategorikan sebagai penduduk tidak miskin.

Sajogyo (1974) sebenarnya telah mengusulkan ukuran kemiskinan melalui perhitungan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Menurutnya ada tiga golongan penduduk miskin, yaitu penduduk sangat miskin yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah 20 kg beras; penduduk miskin adalah mereka yang mengeluarkan per kapita per bulan sebanyak 20 hingga 26 kg beras; dan lapisan yang sedikit miskin adalah mereka yang mengeluarkan antara 26 sampai 30 kg beras per kapita per bulan. Mereka yang mengeluarkan lebih dari 30 kg beras per kapita per bulan dikategorikan sebagai penduduk tidak miskin.

Dalam masyarakat pedesaan Jawa ditemukan berbagai kategori dan kriteria tentang orang miskin. Penny dan Singarimbun (1973) menemukan kategori tentang cukupan dan tidak cukupan. Termasuk dalam kategori cukupan adalah mereka yang bisa makan nasi setiap hari sepanjang tahun dan memiliki bangunan rumah yang permanen, sedangkan tidak cukupan termasuk mereka yang tidak bisa makan nasi sepanjang tahun dan kondisi rumahnya sangat sederhana. Hasil penelitian di Sri-

harjo yang penulis lakukan tahun 1999 mengindikasikan bahwa penduduk lokal membedakan kategori penduduk menjadi lima kategori yakni; *wong sugih*, adalah mereka yang mempunyai akses yang sangat besar terhadap sumber daya sehingga mereka memiliki kesejahteraan yang sangat baik, yang ditandai dengan pemilikan rumah yang bagus, tanah yang luas, pekerjaan yang bagus, juga memiliki kendaraan bermotor seperti mobil pribadi. Kategori kedua adalah *wong nduwe* adalah mereka yang memiliki akses ke sumber daya cukup besar, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki lahan pertanian, memiliki rumah cukup bagus, dan juga memiliki kendaraan bermotor. Kelompok ketiga adalah *wong cukup*, yang ditandai dengan akses ke sumber daya cukup baik, tetapi pola hidupnya tidak begitu mencolok, dengan rumah semi permanen dan tidak pernah kekurangan makan sepanjang tahun. Kategori keempat adalah *wong ora nduwe*, yang dicirikan dari keterbatasan akses ke sumber daya sehingga tingkat penghasilan mereka tidak menentu sepanjang tahun. Konsumsi hariannya sering tidak tercukupi pada saat-saat tertentu seperti masa-masa panceklik, ketika mengalami PHK dari tempat kerja, tidak ada pekerjaan, dan sebagainya. Termasuk dalam kelompok ini adalah buruh tani, buruh bangunan, dan pegawai rendah yang tidak mempunyai akses ke sektor pertanian. Kategori kelima adalah *wong kere/ wong seken*". Rumah tangga ini sering tidak memiliki persediaan pangan untuk makan hari ini sehingga untuk mencukupi kebutuhan makan hari ini, mereka sering masih mengalami kesulitan. Untuk itu, mereka harus bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka tidak mempunyai persediaan makanan sama sekali untuk hari ini. Seringkali mereka bekerja dengan upah makanan matang yang dibawa pulang dan harus dibagi bersama dengan anggota rumah tangga lainnya. Selain kuantitas makan, frekuensi makan dan kualitas makanan mereka juga sangat tidak menentu dan sangat buruk. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang tua, janda, janda dengan anak kecil, dan duda berumur tua. Kelompok ini selain tidak memiliki akses ke sumber daya juga karena mereka memiliki anggota rumah tangga yang cacat, karena

tua, sakit-sakitan, dan sebagainya. Cacat semacam itu menjadi kendala utama bagi rumah tangga pedesaan untuk memperoleh akses ke berbagai bidang pekerjaan. Meskipun demikian, rumah tangga normal pun ada yang mengalami kesulitan akses sehingga mereka masuk dalam kategori rumah tangga sangat miskin.

### **3. Kemiskinan dan Akses terhadap Sumber Daya di Sriharjo**

Desa Sriharjo terletak di kaki Pegunungan Sewu yang gersang di pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini terletak 20 kilometer di sebelah selatan kota Yogyakarta, di perbatasan wilayah Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Luas wilayahnya sekitar 630 hektar dan dihuni oleh hampir 9.500 penduduk yang termasuk dalam sekitar 2000 somah. Sepertiga bagian wilayah desa ini yakni di bagian barat merupakan dataran rendah yang subur dan sisanya di bagian timur merupakan daerah perbukitan yang kering. Areal persawahan yang subur seluas sekitar 164 hektar terdapat di bagian barat desa, sedangkan di bagian timur terdapat sedikit sawah tadah hujan, tegalan, dan hutan. Selain kering dan tidak subur, wilayah bagian timur lebih terisolasi dibandingkan dengan bagian barat desa. Areal pemukiman dan kondisi perumahan di wilayah bagian barat cenderung lebih baik dibandingkan dengan wilayah bagian timur. Hampir seluruh rumah penduduk di bagian barat dibuat permanen dan semipermanen, sedangkan di bagian timur sebagian besar masih sederhana. Selain itu, rata-rata luas pekarangan jauh lebih luas di wilayah bagian barat dibandingkan dengan bagian timur. Pemukiman penduduk di bagian timur mengelompok di kaki perbukitan, berjejer bertingkat sesuai dengan kontur tanah. Monetisasi dan komersialisasi berkembang pesat di bagian barat desa, sedangkan di bagian timur sebaliknya.

Melihat perbedaan yang cukup tajam antara dua wilayah di desa ini, maka untuk mendapatkan gambaran yang agak menyeluruh tentang desa Sriharjo, diambil dua dusun sebagai sampel penelitian, yakni Dusun Miri yang mewakili bagian paling maju dari

Desa Sriharjo dan Dusun Sompok sebagai wakil dari bagian desa yang kurang maju.

Penelitian David Penny dan Masri Singarimbun pada tahun 1969 menunjukkan bahwa desa ini merupakan salah satu tipe desa miskin di Jawa pada awal tahun 1970-an (Penny and Singarimbun, 1973). Mereka menduga bahwa penyebab utama kemiskinan di desa Sriharjo adalah terbatasnya akses penduduk ke sektor pertanian. Selain itu, kesempatan kerja di luar pertanian pada masa lalu juga sangat terbatas. Sebagai upaya mengatasi keterbatasan terhadap pemilikan dan penguasaan lahan pertanian, penduduk di bagian barat desa mengembangkan kegiatan-kegiatan di sektor pertanian seperti buruh derep, ngasak, buruh tani, buruh tebang tebu, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mengembangkan kegiatan nonpertanian seperti membuat gula kelapa, bakul kecil-kecilan, dan sebagainya. Penduduk di bagian timur desa yang dekat ke areal perhutanan sejak lama

telah menjadi pencari kayu bakar, mengumpulkan daun kayu jati, membuat arang, dan bahkan menjadi pencuri kayu di hutan-hutan sekitarnya (Kutanegara, 1998).

Menarik sekali untuk mencermati berbagai perubahan di Sriharjo selama tiga puluh tahun (1969-1999). Distribusi pemilikan lahan mengalami perubahan yang cukup drastis. Rata-rata pemilikan lahan pertanian di desa ini telah turun drastis dari sekitar 0,22 hektar pada tahun 1969 menjadi 400 meter persegi atau 0,04 hektar per rumah tangga pada tahun 1999. Luas lahan tersebut jauh berada di bawah rata-rata pemilikan lahan di Jawa maupun di Indonesia yang berkisar sekitar seperlima hektar. Dengan luas lahan sedemikian sempit, dapat diduga bahwa tanah pertanian tidak bisa lagi diandalkan untuk menopang kehidupan penduduk Sriharjo.

**Tabel 1**  
**Distribusi Pemilikan Sawah di Sriharjo**

Luas Sawah (ha)	Miri 1969 (%)	Miri 1989 (%)	Miri 1999 (%)	Sompok 1999 *) (%)
Tidak ada tanah	37	48	53	57
0,001-0,05	13	16	23	36
0,051-0,10	17	13	14	6
0,101-0,20	17	13	6	0,5
Subtotal	84	90	96	99,5
0,021-0,40	11	6	3	0,5
0,401-0,80	4	4	1	0,5
0,801 dan lebih	2	0	0	0
Total	100	100	100	100
N=	164	159	167	184
*) tadah hujan				

Sumber: Singarimbun, 1993  
Data Primer, 1999

Selain penurunan rata-rata pemilikan lahan pertanian, proporsi penduduk yang tidak memiliki sawah di Miri juga meningkat pesat, dari 37 persen pada tahun 1969 menjadi 48 persen pada tahun 1989, dan kemudian meningkat lagi menjadi 53 persen pada tahun 1999. Di Sompok jumlah penduduk yang tidak memiliki sawah juga cukup tinggi yakni 57 persen. Apalagi di Sompok, kondisi lingkungannya berupa tanah perbukitan yang kering, maka produktivitas lahan juga sangat rendah. Walaupun mereka masih memiliki tegalan, tegalan tersebut hanya bisa ditanami di musim hujan. Secara keseluruhan, apabila penduduk yang tidak memiliki lahan dan pemilikan lahan di bawah 0,20 hektar digabungkan, terjadi peningkatan dari 84 persen pada tahun 1969 menjadi 96 persen pada tahun 1999. Ini menandakan bahwa hanya sekitar 6 persen penduduk memiliki lahan di atas 2000 meter persegi. Keterbatasan akses penduduk ke sektor pertanian juga dapat dilihat dari penguasaan lahan yang juga sangat sempit. Hampir 40 persen penduduk sama sekali tidak memiliki akses ke lahan pertanian. Sistem bagi hasil/garap yang biasanya berkembang di pedesaan Jawa, yang memberikan akses bagi kelompok tuna kisma untuk terlibat dalam kegiatan pertanian, ternyata tidak merata ke seluruh penduduk. Rata-rata pemilikan lahan yang sempit tidak memungkinkan bagi mereka untuk membagi sumber daya yang dimiliki kepada orang lain. Kebiasaan untuk tetap menggarap lahan pertanian setelah bekerja di sektor nonpertanian juga mempersempit akses bagi penduduk yang tidak memiliki lahan pertanian. Oleh karena itu, jelas sekali kelihatan bahwa akses penduduk ke sektor pertanian sangat terbatas di desa ini. Tingkat pemilikan lahan yang sempit telah menghilangkan atau memudahkan kebiasaan untuk membagi resources (sumber daya) yang ada kepada kelompok-kelompok tunakisma. Penduduk yang memiliki lahan lebih dari satu hektar sudah tidak ditemukan lagi di desa ini. Oleh karena itu, diduga peran patron (petani kaya) sebagai salah satu sumber jaminan sosial bagi petani tuna kisma dan kelompok miskin menjadi hilang.

Awal tahun 1980-an ditandai dengan terbukanya peluang kerja di sektor informal di perkotaan Indonesia, seperti tukang be-

cak, pedagang makanan, dan buruh bangunan. Pekerjaan semacam ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah sangat besar dan bahkan mampu menarik pekerja-pekerja dari pedesaan untuk datang ke kota. Keadaan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran peluang kerja di Sriharjo. Penduduk yang tinggal di bagian barat desa yang semula bekerja sebagai buruh tani, petani penyakap, tukang nderes kelapa, bakul, dan buruh tani di perkebunan tebu beralih ke perkotaan. Mereka meninggalkan sektor pertanian untuk bekerja paroh waktu di sektor nonpertanian di kota. Keadaan ini mengakibatkan munculnya kekosongan tenaga kerja pada sektor-sektor yang ditinggalkan penduduk bagian barat desa. Kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh penduduk bagian timur Sriharjo. Oleh karena itu, terjadi rotasi tenaga kerja dalam tingkat desa. Pada saat yang sama juga terjadi pergeseran dari sektor pertanian dan nonpertanian di dalam desa menuju sektor pertanian dan nonpertanian di luar desa. Dalam dekade belakangan ini, kecenderungan untuk bekerja di sektor nonpertanian di kota juga mulai berkembang di bagian timur desa. Oleh karena itu, pada saat ini hampir sebagian besar penduduk telah terlibat dalam kegiatan nonpertanian di luar desa.

Persegeran dan terciptanya peluang kerja di sektor nonpertanian di perkotaan menimbulkan banyak perubahan bagi masyarakat Sriharjo. Migrasi ke luar wilayah, terutama, dengan cara harian/nglaju, semakin pesat pertumbuhannya. Relasi sosial penduduk desa juga menjadi semakin luas, tidak hanya dalam tingkat desa, tetapi juga pada tingkat supradesa. Proses monetisasi semakin deras masuk ke pedesaan karena semua jenis pekerjaan di sektor nonpertanian menghasilkan uang kontan. Proses individualiasi juga semakin berkembang menggantikan komunalisme yang selama ini ada di desa. Di lain pihak, pendapatan di sektor nonpertanian di perkotaan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan di sektor pertanian di desa telah meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduk Sriharjo. Kemiskinan yang selama ini sangat tinggi di Sriharjo perlahan-lahan mulai berkurang. Namun, rumah tangga miskin masih tetap dapat ditemui hampir di seluruh bagian desa ini.

Tabel 2  
Pekerjaan Pokok Kepala Rumah Tangga di Sriharjo

Tipe Rumah Tangga	Sompok (%)	Miri (%)
Buruh Tani	15	8
Tani	40	29
Buruh Bangunan & Jasa	42	41
PNS/TNI/Polri	3	22

Sumber: Data Primer, 1999

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hampir sebagian penduduk Dusun Sompok bekerja di nonpertanian yakni sebagai buruh bangunan dan pegawai negeri. Sementara di Dusun Miri, hampir dua pertiga di antara penduduk bekerja di sektor pertanian. Jumlah pegawai negeri dan TNI/Polri di Dusun ini memang cukup tinggi. Hal tersebut jelas berkaitan dengan pendidikannya yang cenderung lebih tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Sriharjo terlibat cukup besar dalam kegiatan-kegiatan nonpertanian di kota. Walaupun demikian, sektor pertanian masih tetap mendapat tempat yang penting dalam masyarakat ini. Seperti halnya di tempat-tempat lainnya di pedesaan Jawa, hampir tidak ada satu rumah tangga pun yang hanya bergantung kehidupannya dari satu jenis pekerjaan. Tiap-tiap rumah tangga memiliki bermacam-macam pekerjaan. Mereka berusaha menggabungkan kegiatan nonpertanian dengan kegiatan pertanian. Selain itu, hampir semua anggota rumah tangga terlibat dalam berbagai kegiatan mencari nafkah. Dengan melakukan berbagai macam pekerjaan itulah, tercipta berbagai sumber pendapatan yang memungkinkan mereka untuk dapat survive di desa.

Kondisi kesejahteraan penduduk yang menggabungkan kegiatan pertanian dengan nonpertanian cenderung lebih baik dibandingkan dengan penduduk yang hanya mengandalkan salah satu diantaranya. Penduduk yang hanya bekerja di salah satu sektor, baik pertanian maupun hanya nonpertanian, cenderung lebih tidak terjamin kehidupannya dibandingkan dengan kelompok yang bekerja di kedua bidang tersebut.

Hal tersebut disebabkan pendapatan dari kedua sektor sangat penting artinya dalam menunjang kehidupan mereka di desa. Pekerjaan di sektor pertanian memungkinkan mereka untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk barang seperti beras dan kebutuhan harian lainnya, sementara pekerjaan nonpertanian memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh uang kontan. Dalam ekonomi pedesaan yang semakin modern, kedua penghasilan tersebut (bahan makanan dan uang kontan) sangat penting artinya.

Untuk mendapatkan gambaran secara kuantitatif jumlah penduduk miskin di desa ini, dibuat klasifikasi berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga per bulan. Penggunaan pengeluaran rumah tangga merupakan patokan untuk menghindari kelemahan dari sulitnya mengukur tingkat pendapatan rumah tangga per bulan. Guna menghindari pengaruh tingkat inflasi yang begitu besar, maka digunakan ekuivalen beras sebagai patokan. Dengan menggunakan patokan ekuivalen beras, maka jumlah penduduk miskin di Dusun Miri telah menurun dari 44 persen pada tahun 1969 menjadi 28 persen pada tahun 1989. Angka ini mengalami penurunan lagi menjadi 9 persen pada tahun 1999. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di Sompok masih tetap tinggi, yakni 56 persen, sementara jumlah penduduk miskin relatif sama jumlahnya. Perbedaan besar mulai tampak kalau dilihat penduduk sedikit miskin yang perbandingannya hampir dua kali lipat. Apalagi kalau dilihat penduduk tidak miskin, terjadi perbedaan cukup jauh antara Sompok dan Miri.

Tabel 3  
Klasifikasi Rumah Tangga di Sriharjo

Tipe Rumah Tangga	Sompok (%)	Miri (%)
Sangat Miskin	56	9
Miskin	20	18
Sedikit Miskin	16	35
Tidak Miskin	8	38

Sumber: Data Primer, 1999

Perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antara Miri dan Sompok berkaitan dengan berbagai aspek sosial ekonomi penduduknya. Sebagai dusun yang lebih terisolasi, lingkungan sekitarnya adalah perbukitan kering yang hanya bisa ditanami pada musim hujan. Sebaliknya, Dusun Miri merupakan areal tanah pertanian yang subur, dengan masa panen padi minimal 2 kali dalam satu tahun. Hal ini mengakibatkan tingkat konsumsi di Sompok memang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk Miri. Konsumsi harian penduduk Miri adalah beras, sedangkan di Sompok masih terdapat penduduk yang mengonsumsi campuran beras dengan jagul. Perbedaan akses ke jalan raya juga menjadi kendala bagi wilayah Sompok. Kondisi jalan yang masih buruk mengakibatkan terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian. Berbagai keterbatasan tersebut secara sosial telah menempatkan wilayah bagian timur Sriharjo sebagai wilayah miskin. Dalam tingkat desa, mereka mendapatkan sebutan "wong gunung" yang lebih berkonotasi negatif seperti miskin, tidak berpendidikan, dan mempunyai status sosial yang rendah.

Penduduk paling miskin (sangat miskin) umumnya didominasi oleh rumah tangga yang memiliki hambatan karena anggota rumah tangga cacat, jumlahnya tidak lengkap, dan rumah tangga tidak memiliki akses ke sumber daya. Akses ke sumber daya tidak semata-mata berarti sumber daya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Bagi kelompok miskin, akses yang rendah terhadap ekonomi juga akan diikuti oleh rendahnya akses terhadap masalah sosial dan

politik. Karena kemiskinannya, mereka menjadi terbatas untuk bisa mengakses berbagai sumber informasi dan *networking* yang saat ini merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendapatkan akses ke ekonomi. Sebagai kelompok miskin, mereka sadar bahwa penganekaragaman jenis pekerjaan dan maksimalisasi anggota rumah tangga untuk mendapatkan pekerjaan merupakan strategi yang harus mereka kembangkan. Namun dalam kenyataannya, untuk mendapatkan akses ke jenis-jenis pekerjaan, baik di sektor pertanian maupun di sektor nonpertanian, mereka masih mengalami kesulitan. Rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian yang memiliki disertai lemahnya *networking* dan relasi sosial menjadi penghambat utama bagi mereka.

Penduduk yang memiliki akses ke sumber daya, kehidupannya cenderung lebih baik dibandingkan dengan yang mengalami kendala akses. Mereka menempati kelas sosial tinggi, seperti pegawai negeri, birokrasi desa, dan kelompok pedagang dan pengusaha. Pegawai negeri yang terdiri dari guru, pegawai pemerintah, polisi, anggota TNI/POLRI dan perangkat desa merupakan kelompok atas di desa. Hampir semua kelompok ini juga bekerja di sektor pertanian, yang mereka lakukan pada sore hari. Dengan demikian, mereka mencoba menggabungkan pendapatan sektor pertanian dan nonpertanian. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini adalah mulai munculnya kelas sosial atas dari kelompok miskin pada masa lalu. Walaupun tingkat pendidikan mereka rendah, mereka sangat giat bekerja sebagai buruh bangunan di

kota. Mereka ini menginvestasikan kelebihan pendapatannya di sektor pertanian melalui sistem sewa-menyewa lahan, gadai, dan pembelian lahan pertanian. Dengan cara itu, akses ke sektor pertanian yang selama ini tertutup bagi mereka (karena kemiskinan di masa lalu) telah dite-robos lewat keberhasilan di sektor non-pertanian.

Tampak jelas bahwa mereka yang menggabungkan pendapatan sektor pertanian dengan nonpertanian lebih mampu *survive* dibandingkan dengan mereka yang hanya tergantung pada salah satu pekerjaan. Dalam masa krisis yang lalu, buruh bangunan dan buruh pabrik yang tidak memiliki pekerjaan di sektor pertanian di desa menjadi sangat terpukul dan mengalami bencana yang hebat. Sebaliknya, mereka yang menggabungkan pekerjaan non-pertanian dengan pertanian, keadaannya jauh lebih baik. Meski sebenarnya penduduk sadar bahwa penggabungan kegiatan pertanian dan nonpertanian sangat penting untuk menopang kehidupannya; bagi mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, untuk mendapatkan akses ke sektor pertanian bukanlah pekerjaan yang mudah. Sebaliknya, bagi penduduk yang selama ini bekerja di sektor pertanian, untuk mendapatkan akses ke sektor nonpertanian juga tidak mudah. Apalagi bagi kelompok-kelompok rumah tangga yang anggotanya tidak lengkap, baik karena meninggal maupun sakit maka akses ke sektor pertanian maupun sektor nonpertanian menjadi sangat terbatas. Keterbatasan akses yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal ini telah memosisikan mereka menjadi golongan paling bawah di desa. Berbagai kesulitan selalu mereka hadapi dalam kehidupannya. Walaupun demikian, tidaklah berarti bahwa kelompok ini sama sekali tidak berusaha untuk mengubah nasibnya. Perjuangan dan kerja keras merupakan kegiatan rutin mereka setiap hari. Seorang informan menyatakan "kalau kami tidak bekerja, kami tidak makan hari ini," ucapnya.

#### 4. Kesimpulan

Berbagai cara ditempuh penduduk miskin untuk mempertahankan kehidupannya. Penduduk Sriharjo telah mengembangkan strategi berupa penganekaragaman jenis pekerjaan. Selain bekerja di sektor pertanian, mereka juga bekerja di sektor non-pertanian. Di sektor pertanian, mereka bekerja sebagai petani pemilik ataupun petani penggarap, sedangkan di sektor non-pertanian mereka bekerja sebagai buruh bangunan, buruh pabrik, buruh industri dan pegawai negeri. Dengan penggabungan tersebut, kebutuhan akan barang-barang untuk konsumsi harian seperti beras dan sayur-sayuran dapat terpenuhi, sementara kebutuhan uang kontan juga terpenuhi. Selain itu, penduduk juga melakukan maksimalisasi kegiatan anggota rumah tangga. Hampir semua anggota rumah tangga bekerja untuk menyokong kehidupannya. Fenomena ini menegaskan bahwa walaupun pertumbuhan sektor nonpertanian cukup tinggi dan memberikan pendapatan cukup besar bagi penduduk, peran sektor pertanian masih tetap penting bagi penduduk pedesaan di Jawa.

Walaupun berbagai cara mereka lakukan dalam menyasiasi kesulitan hidupnya, penduduk miskin masih tetap ada di Sriharjo. Hampir di semua dusun masih dapat ditemui rumah tangga miskin. Hal itu disebabkan oleh tidak merata dan tidak samanya akses bagi semua penduduk terhadap sumber daya yang ada. Untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ternyata bukanlah pekerjaan mudah bagi semua penduduk pedesaan. Masih terdapat penduduk yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses tersebut. Keterbatasan akses terhadap sumber daya ini menyebabkan munculnya isolasi terhadap penduduk miskin. Isolasi dapat dilihat dalam hal informasi, kekuasaan (*power*), kesempatan kerja, *networking*, dan bahkan kadangkala juga sistem bantuan yang sebenarnya menjadi sumber jaminan sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. & K. Benda-Beckmann. 1994. "Coping With Insecurity" in *Focaal*, 22(23): 7-31.
- Biro Pusat Statistik. 1994. *Hasil perhitungan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1993*. Jakarta: BPS.
- Husken, Frans. 1988. "Cycles of Commercialization in a Central Javanese Village", in G. Hart, A Turton & B. White (eds.) *Agrarian Transformation, Local Processes and the State in Southeast Asia*. Berkeley, Oxford, University of California Press: 303-331.
- . 1998. *Masyarakat Desa Dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa, 1850-1980*. Jakarta: Grasindo.
- International Labour Office. 1999. *WB/ILO/JMOL/JIL Seminar on Economic Crisis, Employment and Labour Market in East and South-East Asia (Indonesia Country Paper)*. Geneva: LO.
- Kutanegara, Pande Made. 1998. "Dinamika Kesejahteraan: Sriharjo Dalam Masa Krisis". Paper dalam Seminar Social Security and Social Policy. Yogyakarta: PPK-UGM.
- and Gerben Nooteboom. 2000. *Forgotten Villages: The Effects of the Crisis and the Role of the Government in Rural Java*. Nijmegen: University of Nijmegen.
- Palte, J.G.L. 1984. *The Development of Java's Rural Uplands in Response to Population Growth: an Introductory Essay in Historical Perspective*. Yogyakarta: Faculty of Geography.
- Penny, David & Masri Singarimbun. 1973. *Population and Poverty in Rural Java: Some Economic Arithmetic from Sriharjo*. Ithaca: Cornell University.
- Sajogyo. 1974. *Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Hasil Survey Evaluasi Proyek UPGK-1973*. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan, IPB.
- Singarimbun, Masri. 1996. "Peluang Kerja dan Kemiskinan di Miri-Sriharjo" dalam *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Hlm.166-180.
- Soetrisno, Loekman. 1995. "Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan" dalam *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Awan Setya Dewanta (ed.). Yogyakarta: Penerbit Aditya Media : 17-24
- Suryo, Djoko. 1985. "Sekitar Masalah Kemiskinan di Pedesaan Pada Masa Pemerintahan Kolonial". *Agro-Ekonomika*, Nomor 23 Tahun XVI: 81-96.
- Tjptoherijanto, Priyono. 1997. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Jaringan Ekonomi Pedesaan: Sebagai Suatu Strategi" dalam *Populasi*, 8 (2): 1-18 .
- Tjondronegoro, Sediono, M.P. 1990. "Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa" dalam *Prisma*, 19 (2): 3-14.
- White, Benjamin. 1976. "Population, Involution, and Employment in Rural Java" in *Development and Change*, 7: 66-81.
- White, Benjamin & Gunawan Wiradi. 1989. "Agrarian and Non-Agrarian Bases of Inequality in Nine Javanese Villages". In G. Hart et. Al (eds.) in *Agrarian Transformations. Accumulation, Social Conflict, and The State in Southeast Asia*. Berkeley: Univ. Of Californis Press: 266-302
- World Bank. 1990. *Indonesia, Strategy for a Sustained Reduction in Poverty*. Washington D.C.: The World Bank.